

JALIN MATRA (JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA) PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN

Ringkasan singkat

Beberapa permasalahan gender dan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan dan penduduk miskin perempuan, dengan kata lain proses kemiskinan kian berwajah perempuan (*The Feminization of Poverty*: Diana M. Pearce, 1978)
2. Kepala Rumah Tangga Perempuan lebih rentan miskin, karena memikul sendiri beban ekonomi keluarga, selain harus bekerja juga harus merawat anak. Selain itu KRTP juga mengalami diskriminasi dalam hal akses permodalan, upah kerja dan kepemilikan property;
3. Sasaran/target program penanggulangan kemiskinan tidak fokus dan tidak berbasis pada database.

4. Model pendekatan dan penanganan penanggulangan kemiskinan cenderung homogen, sama rata tanpa memperhatikan karakteristik Rumah Tangga Sasaran (RTS).

5. Program penanggulangan kemiskinan cenderung top down sesuai keinginan pemberi bantuan, sehingga RTS hanya diposisikan sebagai obyek program. Atas dasar permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur merancang program untuk menangani kemiskinan perempuan yang orisinal, berbasis Basis Data Terpadu *by nama by address, out of the box* dan inovatif.

Program didesain dengan sasaran rumah tangga dengan KRTP atau istilah umum "janda" miskin melalui *Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera) Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan*. Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) PPLS Tahun 2011 yang dirilis oleh TNP2K, di Jatim terdapat 152.343 Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) yang tergolong miskin atau memiliki status kesejahteraan 10% terendah (Desil 1). *Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan* Memiliki tujuan : (i) Memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap Kepala Rumah Tangga Perempuan melalui optimalisasi peran Kader TP-PKK sebagai *mother care* bagi KRTP; (ii) Memperluas akses Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) sasaran terhadap usaha produktif untuk peningkatan aset usaha / pendapatan keluarga; (iii) Membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi KRTP untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar; (iv) Mendorong motivasi berusaha (*need for achievement*) dan kemampuan (*life skill*) KRTP dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Program *Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan* dilaksanakan mulai Tahun 2014-2018.

Proposal

Analisis Masalah

Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inisiatif ini?

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan jumlah penduduk dan telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin secara signifikan, yaitu dari Tahun 2009 penduduk

miskin di Jawa Timur sebesar 6.022.590 jiwa (16,68%) menurun pada september 2014 menjadi 4.748.420 jiwa (12,28%). Ini berarti selama kurun waktu 5 (lima) tahun telah terjadi penurunan sebesar 1.274.170 jiwa (4,40%). Meskipun angka kemiskinan terus menurun, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tetap menempati rangking pertama terbanyak dari 34 provinsi di Indonesia, dan persentase kemiskinan di Jatim pun tetap di atas rata-rata nasional.

Berdasarkan Data BPS menunjukkan jika jumlah penduduk di Jawa Timur ternyata lebih didominasi oleh perempuan. Mengacu pada hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Jawa Timur 37,47 juta, terdiri dari 18,5 juta laki-laki (49,37%) dan 18,97 juta perempuan (50,63%). Hal tersebut diperkuat oleh rilis data TNP2K Juli 2012, menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang dipimpin perempuan (**Kepala Rumah Tangga Perempuan/KRTP**) dengan status kesejahteraan 30% terendah di seluruh Indonesia yaitu sebanyak 2.864.364 KRTP. Provinsi Jawa Timur menempati posisi tertinggi dengan jumlah KRTP sebanyak 700.160 atau 24,4%.

Dominannya jumlah perempuan ternyata tidak dibarengi dengan kesejahteraannya, yang tercermin dari tingkat pendidikan, dimana sebaran KRT tanpa pendidikan atau hanya berpendidikan SD cukup tinggi untuk perempuan (91%) dan laki-laki hanya 79%. Hanya 52% KRTP menyelesaikan pendidikan dasar dibandingkan 74% KRTL, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin rendah persentase KRTP menyelesaikan pendidikannya. Dibidang ketenagakerjaan hanya 60,67% KRTP yang bekerja dibanding 93,3% KRTL yang bekerja. Kemiskinan telah menyebabkan perempuan menanggung beban yang lebih berat dibanding laki-laki. Selain memberikan 66% dari jam kerjanya, perempuan miskin hanya mendapatkan 10% dari hasil kerjanya. Selain itu jam kerja perempuan sekitar 30-50 persen lebih panjang dari laki-laki pada usia yang sama dan untuk pekerjaan yang dibayar maupun tidak dibayar.

Dari uraian diatas terdapat beberapa permasalahan gender dan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan dan penduduk miskin perempuan, dengan kata lain proses kemiskinan kian berwajah perempuan (*The Feminization of Poverty*: Diana M. Pearce, 1978)
2. Kepala Rumah Tangga Perempuan lebih rentan miskin, karena memikul sendiri beban ekonomi keluarga, selain harus bekerja juga harus merawat anak. Selain itu KRTP juga mengalami diskriminasi dalam hal akses permodalan, upah kerja dan kepemilikan property;
3. Sasaran/target program penanggulangan kemiskinan tidak fokus dan tidak berbasis pada database. Model pendekatan dan penanganan penanggulangan kemiskinan cenderung homogen, sama rata tanpa memperhatikan karakteristik Rumah Tangga Sasaran (RTS).
4. Program penanggulangan kemiskinan cenderung top down sesuai keinginan pemberi bantuan, sehingga RTS hanya diposisikan sebagai obyek program. Atas dasar permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur merancang program untuk menangani kemiskinan perempuan yang orisinal, berbasis Basis Data Terpadu *by nama by address, out of the box* dan inovatif. Program didesain dengan sasaran rumah tangga dengan KRTP atau istilah umum "janda" miskin melalui *Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera) Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan*. Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) PPLS Tahun 2011 yang dirilis oleh TNP2K, di Jatim terdapat 152.343 Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) yang tergolong miskin atau

memiliki status kesejahteraan 10% terendah (Desil 1)

Pendekatan Strategis

Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inisiatif ini telah memecahkan masalah tersebut?

Ide pemecahan permasalahan diinisiasi langsung oleh Gubernur Jatim yang tercermin dari misi “Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat” pada periode pertama Gubernur Soekarwo (2009-2014), kemudian dilanjutkan pada periode kedua (2014-2019) dengan misi “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik”.

Sebagai implementasi dan dalam rangka percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Gubernur Jawa Timur menugaskan Dewan Riset Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Prov. Jatim dan Universitas Brawijaya untuk mendesain Program Jalin Matra. Program Jalin Matra launching pada tanggal **16 Desember 2014** di Gedung Negara Graha Surabaya,
2. Pada saat yang sama diadakan Pendatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Gubernur Jatim dengan seluruh Bupati/Walikota tentang Dukungan Pendampingan dan Pengalokasian Dana Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2015
3. Kesepakatan Bersama antara Bapemas Prov. Jatim dengan Universitas Brawijaya tentang dukungan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Analisa dan Pengelolaan database, serta Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Timur.

Program Jalin Matra merupakan program yang di desain secara khusus dan inklusif bagi masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, sosial, budaya (wong cilik) berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 yang dirilis oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dengan fokus sasaran Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) atau janda sangat miskin dengan memberikan bantuan berupa modal usaha yang dapat digunakan oleh KRTP supaya lebih mandiri.

Tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Analisis Basis Data Terpadu (BDT) PPLS 2011
2. Seleksi RTS Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan dilakukan dengan pengolahan data PPLS 2011 meliputi data agregat maupun data *by name by address*. Proses dimulai dengan analisis data tingkat Provinsi, dimana dari 3.609.369 Rumah Tangga (RT) di Jawa Timur yang masuk dalam PPLS 2011, terdiri dari 1.230.042 RT Desil 1, untuk Desil 2 sejumlah 1.189.670 RT, dan 1.189.652 RT Desil 3. Proses seleksi dibagi dalam lima tahap sebagai berikut : (i) Pemilihan Fokus Sasaran yaitu RT dengan status kesejahteraan 10% berpenghasilan terbawah (Desil 1) sejumlah 1.230.042 Rumah Tangga (RT); (ii) Dari seluruh RT Desil 1 diseleksi hanya Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) diperoleh sejumlah 152.343 RT; (iii) KRTP Desil 1 kemudian hanya dipilih yang memiliki Anggota Rumah Tangga (ART) usia produktif antara 15 - 65 tahun diperoleh 129.904 RT; (iv) Hasil seleksi dari Tahap III kemudian dilakukan seleksi untuk dipilih

KRTP yang memiliki jumlah ART lebih dari 1 orang, atau tidak hidup sendiri (sebatang kara) diperoleh sejumlah 126.293 RT; (v) Dalam rangka efisiensi pelaksanaan, kemudian dilakukan seleksi untuk memilih desa dengan jumlah KRTP minimal 20 KRTP diperoleh sasaran akhir sejumlah 76.283 RT di 2.065 Desa/Kecamatan 507 Kecamatan pada 37 Kabupaten/Kota di Jatim.

3. Tahap verifikasi dan fasilitasi usulan kebutuhan Rumah Tangga Sasaran (RTS) secara partisipatoris deliberatif. Verifikasi merupakan kegiatan klarifikasi lapangan berdasarkan kondisi obyektif saat ini sekaligus melakukan validasi apakah KRTP dimaksud masih layak untuk memperoleh bantuan. Kegiatan fasilitasi Usulan kebutuhan dilakukan dengan mengajak bicara KRTP secara langsung bantuan apa yang dibutuhkan sesuai potensi dan sumber daya yang dimiliki KRTP sehingga bantuan dapat tepat pemanfaatan. Usulan kebutuhan masing-masing Kepala Rumah Tangga Perempuan tidak bisa sama satu dengan yang lain.
4. Tahap Realisasi Bantuan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan berupa uang tunai yang digunakan oleh KRTP sebagai modal investasi dan atau modal kerja sesuai dengan usulan kebutuhan masing-masing KRTP. Meskipun status RTS sama-sama janda, ternyata usulan usaha masing-masing tidak sama, ada yang menginginkan usaha dagang makanan, warung, usaha jasa bahkan kerajinan dan industri kecil. Hal tersebut membuktikan bahwa yang mampu menyelesaikan masalah orang miskin adalah mereka sendiri, sedangkan pemerintah pemberi bantuan hanya berperan sebagai fasilitator.

Dalam hal apa inisiatif ini kreatif dan inovatif

1. Fokus sasaran menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) PPLS 2011 untuk penentuan sasaran. **Janda miskin atau Kepala Rumah Tangga Perempuan** (KRTP) dengan status kesejahteraan 1-10% terendah (Desil 1).
2. Menggunakan prinsip **partisipatoris deliberatif**, tahap verifikasi dilakukan dengan 2 kegiatan, yaitu door to door mendatangi KRTP apakah masih layak mendapatkan bantuan dan melalui musyawarah desa/rembug warga, dengan melibatkan kader PKK dan ketua RT/RW yang paling mengerti kondisi KRTP. Tahap fasilitasi Usulan kebutuhan dilakukan dengan mengajak bicara KRTP bantuan apa yang dibutuhkan sesuai potensi dan sumber daya yang ada supaya tepat pemanfaatan. Hasilnya disimpan dalam database sejumlah 76.283 KRTP *by name by address by picture* dan *by need* secara lengkap.
3. Berlandaskan prinsip dasar yang mengedepankan empati sosial, tidak hanya bertujuan mengembangkan potensi ekonomi janda miskin, tetapi juga harkat dan martabat, motivasi, rasa percaya diri dan harga diri mereka, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat (*nguwongke-wong*) dengan tetap memberikan penghormatan KRTP untuk menentukan jenis bantuan.
4. Melibatkan **peran aktif TP-PKK** sebagai Mitra Kerja Pemerintah yang berfungsi memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir bathin mulai dari tingkat Provinsi sampai tingkat desa untuk mendampingi dan memberdayakan KRTP sasaran mengelola bantuan demi meningkatkan kesejahteraannya.

Pelaksanaan dan Penerapan

Bagaimana strategi ini dilaksanakan?

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada :

1. Peraturan Daerah Prov. Jatim nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 dimana percepatan dan Perluasan Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tujuan dalam Misi 1, yaitu meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan.
2. Sebagai panduan pelaksanaan kegiatan tahun 2014 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pilot Project Jalin Matra Prov. Jatim tahun 2014.
3. Sebagai panduan pelaksanaan kegiatan tahun 2015 telah ditetapkan Pergub Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedum Program Jalin Matra Prov. Jatim Tahun 2015.

Strategi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Verifikasi dan Fasilitasi Usulan Kebutuhan KRTP;Telah dilaksanakan tahun 2014 dengan sasaran 76.283 KRTP di 2.065 Desa/Kelurahan, 507 Kecamatan pada 37 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dengan melibatkan 3.356 Kader PKK desa/kelurahan sebagai pendamping dan enumerator dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Jatim bekerja sama dengan LPPM Universitas Brawijaya sebagai koordinator. (i) Verifikasi adalah klarifikasi lapangan berdasarkan kondisi obyektif saat ini sekaligus validasi apakah KRTP masih layak untuk memperoleh bantuan, dengan : a.Kader PKK *door to door* mendatangi KRTP sasaran untuk memastikan apakah masih layak atau tidak memperoleh bantuan, dan melihat langsung kondisi rumah tinggal KRTP, juga menanyai tetangga terdekat, diharapkan mereka lebih paham kondisi KRTP; b. Musyawarah desa terbatas atau rembug warga, dengan melibatkan kader PKK dan ketua RT/RW karena diharapkan mereka paling mengerti kondisi KRTP. KRTP adalah perempuan yang karena sesuatu hal menyebabkan dia menjalankan fungsi sosial ekonomi sebagai kepala rumah tangga. Penyebab seorang perempuan disebut sebagai KRTP : 1) Telah bercerai; 2) Suami meninggal; 3) Ditinggal suami dalam waktu yang lama (minimal 6 bulan) dan tidak dinafkahi (diterlantarkan); 4) Memiliki suami yang difabel/cacat dan atau mengalami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktifitas produktif. KRTP dinyatakan tidak layak dibantu, dengan kriteria : a. KRTP telah menikah lagi; b. KRTP Meninggal dunia/pindah; c. Berdasarkan hasil rembug warga terbatas dianggap memiliki status sosial ekonomi lebih baik; d. Anggota Rumah Tangga/ART hanya tinggal 1 orang; e. Menolak bantuan. (ii) Fasilitasi Usulan kebutuhan KRTP adalah penjangkauan aspirasi dan usulan kebutuhan KRTP sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki KRTP, sekaligus memfasilitasi KRTP untuk merumuskan dan mengajukan usulan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kegiatan dilakukan dengan mengajak bicara KRTP atau ART secara langsung bantuan apa yang dibutuhkan, bantuan juga dapat dimanfaatkan oleh ART yang produktif, misalnya KRTP sudah lanjut usia tapi tinggal dengan ART yang masih produktif, maka bantuan dapat dimanfaatkan oleh ART untuk melakukan usaha. Selain itu juga dilakukan rembug KRTP supaya variasi usaha KRTP lebih terkontrol, misalnya dalam satu Rukun Warga semua KRTP butuh usaha jualan bakso. Hasil verifikasi dan fasilitasi usulan kebutuhan KRTP tersimpan dalam sistem basis data terpadu sasaran Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan berisi 76.283 KRTP di 2.065 desa/kelurahan 507 Kecamatan di 37 Kabupaten secara *by name by address, by picture, by need* dan *by characterictic*.
2. Fasilitasi Bantuan KRTPTelah dilaksanakan mulai 2014 berupa Pilot Project Jalin Matra PFK dengan sasaran 3.309 KRTP di 54 Desa 10 Kabupaten dengan melibatkan 179 kader PKK desa dikoordinir oleh 20 tenaga pendamping Kabupaten. Tahun 2015 menjangkau 14.568 KRTP di 416

Desa 29 Kabupaten dengan melibatkan 948 kader PKK desa yang dikoordinir oleh 104 tenaga pendamping Kabupaten. Untuk 2016 direncanakan menjangkau 11.850 KRTP di 374 desa 29 Kabupaten. Bantuan kepada KRTP dipergunakan untuk:

- Usaha Ekonomi Produktif meliputi Modal Investasi berupa sarana prasarana usaha dan Modal Kerja misalkan bahan baku, barang dagangan minimal 70%.
- Usaha pendukung misalnya Pertanian Karangkitri (Rumah Pangan Lestari), Usaha ternak Kecil dan Perikanan maksimal 30%.
- Apabila perlu dapat dialokasikan untuk pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk meningkatkan kualitas hidup KRTP sehari-hari maksimal 10% dari total bantuan KRTP.

File Pendukung : [AF_sumanda_SINOVIC.jpg](#)

Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan?

Organisasi pelaksana Jalin Matra melibatkan stakeholder dari tingkat Provinsi sampai dengan tingkat desa yang dikoordinasikan langsung oleh Gubernur Jatim. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Program Jalin Matra Tahun 2015, sebagai berikut :

1. Tingkat Provinsi meliputi : (i) Gubernur Jatim sebagai penanggungjawab; (ii) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Prov. Jatim sebagai wadah koordinasi koordinasi sektoral dan lintas para pemangku penanggulangan kemiskinan; (iii) Sekretariat Program Jalin Matra diketuai oleh Sekretaris Daerah Jatim, dengan *leading sector* Bapemas Provinsi Jatim, beranggotakan SKPD dan TP-PKK Prov. Jatim ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur; (iv) TP-PKK Prov. Jatim, Mitra Kerja Pemerintah Provinsi yang berfungsi memberdayakan keluarga untuk Meningkatkan kesejahteraan; (v) Pendamping Provinsi, tenaga pendukung dan mitra Sekretariat dalam pengelolaan kegiatan, dari unsur LPPM Universitas Brawijaya;
2. Tingkat Kabupaten, meliputi : (i) Bupati, sebagai penanggungjawab Tingkat Kabupaten; (ii) Sekretariat Program Jalin Matra Kabupaten diketuai oleh Sekda Kabupaten, dengan Sekretaris dari Bapemas Kabupaten, beranggotakan SKPD, Kecamatan dan TP-PKK Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati; (iii) Pendamping Kabupaten, dari unsur relawan pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan dimasing-masing Kabupaten dan bertugas memfasilitasi pelaksanaan Jalin Matra PFK di Kabupaten; (iv) Tim Fasilitas Kecamatan, bagian dari Sekretariat Kabupaten yang berada di tingkat Kecamatan, yang beranggotakan Camat dan Ketua TP-PKK Kecamatan
3. Tingkat Desa : (i) Sekretariat Desa, pelaksana dan penanggungjawab kegiatan Jalin Matra di tingkat Desa, beranggotakan Kepala Desa, Ketua BPD, perangkat Desa, LPMD dan TP-PKK Desa; (ii) Pendamping Desa, adalah Kader PKK Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Desa sebagai pendamping untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di Desa, terutama mendampingi Pokmas dan KRTP; (iii) Kelompok masyarakat (Pokmas) adalah sekumpulan KRTP yang secara sukarela dan partisipatif bersepakat bergabung dalam rangka pengembangan usaha dan memperkuat modal sosial dibentuk dengan memperhatikan kedekatan tempat tinggal. Pokmas berfungsi sebagai lembaga *channeling* dalam rangka mengefektifkan pencairan bantuan, realisasi usaha KRTP, bimbingan usaha serta pengembangan jejaring.

Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inisiatif ini dan bagaimana sumber daya itu dimobilisasi?

1. Sumber Daya Pendanaan Anggaran untuk Jalin Matra PFK direncanakan sejumlah total Rp.292 Milyar selama Tahun 2014 - 2015, dengan penggunaan: (i) Bantuan untuk KRTP masing-masing Rp.2,5 juta untuk 76.283 KRTP senilai total Rp.190 Milyar selama tahun 2014-2018, mekanisme penyalurannya melalui Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa dengan penggunaan : (a) Usaha Ekonomi Produktif meliputi Modal Investasi berupa sarana prasarana usaha dan Modal Kerja misalkan bahan baku, barang dagangan minimal 70%; (b) Usaha pendukung misalnya Pertanian Karangkitri (Rumah Pangan Lestari), Usaha ternak Kecil dan Perikanan maksimal 30%;

- (c) Dapat dialokasikan untuk pemenuhan Kebutuhan Dasar berupa sarana prasarana atau kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup KRTP maksimal 10% dari total bantuan.
- (ii) Operasional Sekretariat Desa dan Kader PKK desa untuk pembinaan dan pelaksanaan Jalin Matra PFK di 2.065 Desa/Kelurahan sejumlah Rp.38 Milyar selama tahun 2014 - 2018; (iii) Operasional Sekretariat Kabupaten/Kota untuk pembinaan dan pelaksanaan Jalin Matra PFK di 37 Kabupaten/Kota sejumlah Rp.15 Milyar selama tahun 2014 - 2018 melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; (iv) Pendampingan bekerjasama dengan LPPM Universitas Brawijaya untuk mengkoordinasikan pendampingan di 2.065 desa/Kelurahan 37 Kabupaten sejumlah total Rp.16 Milyar selama tahun 2014 - 2018 melalui swakelola; (v) Operasional Sekretariat Provinsi untuk sosialisasi, orientasi pendamping desa dan sekretariat desa serta monitoring dan evaluasi di 2.065 Desa sejumlah total Rp.30 Milyar.
2. Sumberdaya Manusia Melibatkan stakeholder dari birokrasi, akademisi, relawan pemberdayaan masyarakat sampai kader Tim Pengerak PKK Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai desa yang dikoordinasikan langsung oleh Gubernur. Seluruh stakeholder yang terlibat diberi peran dan tanggungjawab masing-masing dan dikoordinasikan dalam Sekretariat Program Jalin Matra mulai tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Desa.
 1. Tingkat Provinsi terdapat Sekretariat Provinsi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/142/KPTS/013/2015 tentang Sekretariat Program Jalin Matra Prov. Jatim Tahun 2015 yang diketuai Sekda Jatim dengan Sekretaris Kepala Bapemas Prov. Jatim dan anggota dari SKPD terkait, yaitu Bappeda, Badan PP dan KB, BPS, Dinas Perindag, Dinas Koperasi, Dewan Riset Daerah dan Tim Pengerak PKK.
 2. Sekretariat Provinsi juga melibatkan 3 Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jatim dengan Rektor saat launching Program Jalin Matra tanggal 16 Desember 2014 di Gedung Grahadi Surabaya untuk mengawal, mendampingi merekrut tenaga pendamping Kabupaten dan Kader PKK desa dan memfasilitasi pelaksanaan Program Jalin Matra.
 3. Saat Launching Program Jalin Matra juga dilakukan pendatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Gubernur dengan Bupati/Walikota tentang Dukungan Pendampingan dan Pengalokasian Dana Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2015. Jalin Matra sepenuhnya dibiayai oleh APBD Jatim, akan tetapi menindaklanjuti MoU dimaksud, Kabupaten/Kota dapat menyediakan anggaran dari APBD masing-masing untuk membiayai kegiatan Program Jalin Matra di wilayahnya baik itu untuk operasional sekretariat, pelestarian dan pendampingan pasca program maupun untuk KRTP lain diluar sasaran APBD Provinsi.
 3. Sumberdaya Teknis Dalam rangka memberikan panduan pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, telah ditetapkan Pedoman Umum Program Jalin Matra melalui : (i) Peraturan Gubernur Jatim Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pilot Project Program Jalin Matra Tahun 2014. (ii) Pergub Jatim Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Program Jalin Matra Tahun 2015.

Apa saja keluaran(output) yang paling berhasil?

1. Tahun 2014 berupa Pilot Project Jalin Matra (PFK) dengan sasaran 3.309 KRTP di 54 Desa pada 10 Kabupaten dengan melibatkan 179 kader PKK desa yang dikoordinir oleh 20 tenaga pendamping Kabupaten. Kemudian tahun 2015 menjangkau 14.568 KRTP di 416 Desa pada 29 Kabupaten dengan melibatkan 948 kader PKK desa yang dikoordinir oleh 104 tenaga pendamping

Kabupaten.

TAHUN PELAKSANAAN	KRTP YANG MEMILIKI USAHA	JUMLAH DESA	KABUPATEN	KADER PKK DESA	PENDAMPING KABUPATEN
2014	3.309	54	10	179	20
2015	14.568	416	29	948	104
TOTAL	17.877	470		1.127	124

2. Hasil pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan :

- Dana bantuan telah direalisasikan 100% kepada 17.877 Kepala Rumah Tangga Sasaran (KRTP) masing-masing sejumlah Rp.2.500.000,-.
- KRTP sasaran telah merealisasikan dana bantuannya untuk kegiatan usaha dengan rincian sebagai berikut : (i)Usaha perdagangan, mracang, gerobak makanan dan warung makan sebanyak 54,38%; (ii) Pengrajin kreatif, pertukangan, reparasi dan tambal ban sebanyak 14,72%; (iii) Usaha jasa sebanyak 4,05%; (iv) Usaha lain termasuk pertanian, perikanan dan peternakan sebanyak 26,84%

3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Tim Sekretariat Program Jalin Matra Prov. Jatim yang dilakukan pada Desa lokasi, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Seluruh Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) Sasaran telah menerima bantuan Program Jalin Matra;
- Sebanyak 99,53% KRTP menyatakan sangat terbantu dengan Program Jalin Matra.
- Sebanyak 98,14% KRTP menyatakan bantuan yang diterima telah sesuai dengan kemampuan, ketrampilan dan kebutuhan.
- Ada beberapa KRTP yang belum mampu merealisasikan dana bantuan untuk kegiatan usaha sesuai usulan.

4. Sekretariat Program Jalin Matra juga menjalin kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Airlangga dalam rangka melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi independen pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi kemiskinan dengan hasil sebagai berikut :

- Seluruh responden KRTP telah 100% menerima bantuan program Jalin Matra PFK senilai Rp.2.500.000,- per KRTP.
- Sebanyak 97% responden KRTP menyatakan siap mengelola bantuan, sedangkan sisanya memerlukan bimbingan dari kader PKK.
- Sebanyak 92% responden KRTP memiliki komitmen dalam mengelola bantuan yang diterima, karena telah memiliki rencana pengelolaan bantuan berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Sedangkan sisa responden memerlukan panduan dan bimbingan dari kader PKK.

Sistem apa saja yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan?

Dalam rangka pelaksanaan program, pemerintah Provinsi melibatkan kader PKK sampai dengan tingkat desa untuk melakukan pendampingan. Pendampingan dilaksanakan untuk memfasilitasi pengelolaan program, pembinaan realisasi usaha, dan pengelolaan bantuan kepada KRTP sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mekanisme, sistem serta prosedur yang ditentukan. Pendampingan dilakukan dengan menggunakan pendekatan mikro per rumah tangga serta kelompok karena masing-masing KRTP memiliki karakteristik yang khusus tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga sosiokultural dan psikologis. Kader Tim Penggerak PKK adalah figur yang tepat untuk berposisi sebagai "mother care" bagi KRTP, atau lainnya sebagai sosok ibu/orang tua yang memiliki kepedulian yang tinggi, menjadi simpul interaksi dan berbagi antar KRTP sehingga akan memupuk harapan serta semangat untuk berjuang bersama-sama dalam upaya keluar dari kemiskinan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Gerakan PKK merupakan Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat. Jejaring PKK dapat menjangkau kepada keluarga-keluarga secara langsung, karena telah terbentuk kelompok-kelompok PKK RW, RT dan kelompok Dasa Wisma. Sehingga melalui optimalisasi TP-PKK dalam Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan diharapkan dapat benar-benar secara riil memecahkan permasalahan problematika kemiskinan yang berwajah perempuan di tingkat keluarga. Kader PKK Desa/Kelurahan selama ini telah terbukti menjadi relawan pemberdayaan keluarga, oleh karena itu perlu dioptimalkan perannya untuk melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program sekaligus perkembangan usaha KRTP. Kader PKK diharapkan adalah orang yang paling faham dan paling dekat dengan kondisi KRTP, diharapkan pelaksanaan lebih optimal.

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh kader PKK desa selaku pendamping desa, sekretariat desa, pendamping Kabupaten, sekretariat kabupaten, LPPM Universitas Brawijaya selaku pendamping provinsi serta sekretariat provinsi baik secara berkala maupun insidental bergantung pada kebutuhan dengan hasil sebagai berikut :

1. Seluruh Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) Sasaran telah menerima bantuan Program Jalin Matra;
2. Sebanyak 99,53% KRTP menyatakan sangat terbantu;
3. Sebanyak 98,14% KRTP menyatakan bantuan yang diterima telah sesuai dengan kemampuan, ketrampilan dan kebutuhan.

Selain itu Sekretariat Provinsi juga menjalin kerjasama dengan LPPM Universitas Airlangga dalam rangka melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi independen Jalin Matra PFK dengan hasil sebagai berikut :

1. Seluruh responden KRTP telah 100% menerima bantuan senilai Rp.2.500.000,- per KRTP.
2. Sebanyak 97% responden KRTP menyatakan siap mengelola bantuan, sedangkan sisanya memerlukan bimbingan dari kader PKK.
3. Sebanyak 92% responden KRTP memiliki komitmen dalam mengelola bantuan yang diterima, karena telah memiliki rencana pengelolaan bantuan berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Sedangkan sisa responden memerlukan panduan dan bimbingan dari kader PKK.

Apa saja kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi?

1. KRTP cenderung kurang memiliki kemampuan berusaha (jiwa entrepreneur) dan mayoritas

masyarakat miskin apabila ditanya butuh bantuan apa, menjawab terserah yang memberi, oleh karena itu **solusinya** Kader PKK sebagai pendamping dituntut kesabarannya dengan mengajak bicara KRTP dari hati ke hati untuk dapat menggali potensi yang dimiliki oleh KRTP serta membimbing KRTP dalam pengelolaan usaha.

2. Jumlah KRTP dengan kesejahteraan 10% terendah di Jatim cukup banyak sebesar 152.343 KRTP, sementara kemampuan anggaran terbatas sehingga hanya mampu menjangkau 76.283 KRTP dengan kriteria tertentu. **Solusinya** diharapkan bupati/walikota mengalokasikan anggaran untuk menangani 76.060 KRTP diluar yang ditangani provinsi.
3. Basis data yang digunakan adalah PPLS 2011, berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan terdapat bias atau ketidak sesuaian sekitar 20%, selain itu PPLS tahun 2011 sehingga saat ini banyak perubahan yang terjadi. **Solusinya** dilakukan verifikasi yang merupakan kegiatan klarifikasi lapangan berdasarkan kondisi obyektif terkini sekaligus melakukan validasi apakah KRTP masih layak untuk memperoleh bantuan, dan dimungkinkan mengganti KRTP yang tidak layak melalui mekanisme musdes atau rembuk warga.
4. Kecemburuan sosial bagi rumah tangga selain KRTP yang tidak mendapat bantuan, mereka kerap meminta bantuan karena merasa miskin, **solusinya** diperlukan peran aktif pemerintah desa bersama tokoh masyarakat untuk memberikan sosialisasi terkait Jalin Matra, sehingga dapat memperoleh dukungan tidak hanya dari KRTP penerima bantuan tetapi juga dari seluruh masyarakat. Sekretariat Provinsi dan Kabupaten telah berupaya untuk meningkatkan koordinasi dengan pendamping Kabupaten maupun Sekretariat Desa.
5. Masalah geografis juga menjadi kendala, umumnya KRTP miskin tinggal dikawasan yang sulit dijangkau, hal ini tentu menjadi tantangan bagi kader PKK untuk memantau secara rutin, KRTP sendiri kesulitan dalam penentuan jenis usaha, karena terbatasnya pilihan usaha di kawasan yang terpencil dan jarang penduduk, pilihan yang paling rasional adalah ternak kambing atau domba. **Solusinya** Kader PKK selaku pendamping yang paling dekat dengan KRTP harus aktif berdiskusi dengan KRTP untuk menggali potensi apa yang bisa dikembangkan.

Dampak dan Keberlanjutan

Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inisiatif ini?

1. Output yang paling berhasil berhasil ditingkat makro adalah penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Berdasarkan Berita Resmi statistik BPS Prov Jatim tanggal 4 Januari 2016 Selama periode Maret - September 2015, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 13.150 jiwa atau 0,06% dari 4.789.120 jiwa (12,34%) pada Maret 2015 menjadi 4.775.970 jiwa (12,28%) pada September 2015. Bahkan untuk pedesaan jumlah penduduk miskin turun 59.680 jiwa atau 0,34%, sedangkan di perkotaan justru terjadi kenaikan angka kemiskinan sebesar 46.530 jiwa atau 0,22%. Pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan selama Tahun 2014 - 2016 diprioritaskan untuk wilayah pedesaan yang memiliki persentase kemiskinan jauh lebih tinggi dibanding wilayah perkotaan.
2. Sedangkan pada tingkat mikro, output yang dapat dilihat diantaranya adalah peningkatan kondisi ekonomi KRTP sasaran melalui peningkatan pendapatan yang dirasakan setelah memperoleh bantuan, hal tersebut dapat dibuktikan beberapa KRTP yang telah memperoleh bantuan sebagai berikut :
3. BU KATIJEM (70) Desa Karanganyar kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek bantuan uang tunai

digunakan untuk meningkatkan modal usaha warung sembako/mracang yang telah dimiliki sebelumnya. sebelum memperoleh bantuan pendapatan beliau per bulan kurang dari Rp.400 ribu setelah mendapatkan bantuan meningkat antara Rp.50.000 - 100.000 rupiah ;

4. BU KARTIRAH (46) Desa Karanganyar kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, bantuan uang tunai digunakan untuk meningkatkan modal usaha warung sembako/mracang yang telah dimiliki sebelumnya. sebelum memperoleh bantuan pendapatan beliau per bulan kurang dari Rp.400 ribu setelah mendapatkan bantuan meningkat antara Rp.200.000 - 250.000 rupiah;
5. BU YASMI (50) Desa Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, bantuan uang tunai digunakan untuk meningkatkan modal usaha warung sembako/mracang yang telah dimiliki sebelumnya. sebelum memperoleh bantuan pendapatan beliau per bulan sekitar Rp.400 - 700 ribu setelah mendapatkan bantuan meningkat antara Rp.300.000 - 500.000 rupiah ;
6. BU SITI FATIMA (55) Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, bantuan uang tunai digunakan untuk meningkatkan modal usaha warung makan /kopi yang telah dimiliki sebelumnya. sebelum memperoleh bantuan pendapatan beliau per bulan kurang dari Rp.400 ribu setelah mendapatkan bantuan meningkat antara Rp.300.000 - 400.000 rupiah;
7. BU SITTINA (67) Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, bantuan uang tunai digunakan untuk modal usaha pendapatan krupuk singkong dan ternak kambing. Sebelum memperoleh bantuan pendapatan per bulan kurang dari 400 ribu setelah mendapatkan bantuan meningkat antara Rp.100.000 - 300.000 rupiah ;

Success story penerima bantuan Program Jalin Matra dapat dilihat pada alamat situs www.bapemas.jatimprov.go.id.

Apakah inisiatif ini berkelanjutan dan direplikasi?

Jalin Matra Penanggulangan Feminsasi Kemiskinan direncanakan akan memberikan bantuan kepada 76.283 Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) atau janda miskin di 2.065 desa/kelurahan 507 kecamatan pada 37 Kabupaten/Kota di Jawa Timur secara bertahap mulai tahun 2014 sampai dengan 2018.

1. Untuk tahun 2014 telah direalisasikan bantuan untuk 3.309 KRTP di 54 Desa pada 10 Kabupaten,
2. Tahun 2015 telah direalisasikan bantuan untuk 14.568 KRTP di 316 Desa pada 29 Kabupaten.
3. Sedangkan di Tahun 2016 ini direncanakan memberikan bantuan bagi 11.850 KRTP di 374 desa pada 29 Kabupaten. Pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan feminsasi Kemiskinan tahun 2014 - 2016 diprioritaskan untuk wilayah pedesaan dan belum menyentuh warga perkotaan (kelurahan), dikarenakan tingkat kemiskinan di pedesaan yang lebih tinggi dibanding perkotaan yaitu 15,84% di pedesaan dibanding 8,41% di perkotaan.
4. Untuk Tahun 2017 direncanakan tidak hanya menjangkau KRTP di pedesaan, akan tetapi juga di wilayah perkotaan dengan sasaran 25.278 KRTP di 690 desa/kelurahan di 37 Kabupaten/Kota dan
5. Tahun 2018 direncanakan menjangkat 21.278 KRTP di 630 desa/kelurahan pada 37 Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti pematangan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Gubernur Jatim dengan seluruh Bupati/Walikota tentang Dukungan Pendampingan dan Pengalokasian Dana Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2015 pada saat launching Program Jalin Matra Prov. Jatim pada tanggal 16 Desember 2014, beberapa Kabupaten

telah melaksanakan Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) Pola mandiri (Matching Grant) untuk menangani KRTP yang tidak menjadi sasaran dari Provinsi Jawa Timur. Jalin Matra PFK Pola Mandiri Kabupaten/Kota dapat mengadopsi Pedoman Umum Jalin Matra Provinsi Jawa Timur, disesuaikan kemampuan sumberdaya dan kearifan lokal masing-masing daerah. Beberapa Kabupaten dimaksud adalah:

1. Kabupaten Sumenep,
2. Kabupaten Bojonegoro,
3. Kabupaten Lumajang,
4. Kabupaten Situbondo,
5. Kabupaten Probolinggo,
6. Kabupaten Tuban,
7. Kabupaten Tulungagung,
8. Kabupaten Madiun,
9. Kabupaten Ponorogo,
10. Kabupaten Sampang,
11. Kabupaten Pamekasan dan
12. Kota Probolinggo.

Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik?

1. Pemerintah harus hadir ditengah-tengah masyarakat kelas bawah (wong cilik) dengan mengajak bicara mereka dan memberikan bantuan untuk membantu meringankan beban mereka, selain itu Janda miskin perlu dipandang tidak semata-mata sebagai obyek, tapi juga subyek kegiatan karena yang bisa memecahkan masalah janda miskin adalah mereka sendiri. Jadi prinsip partisipatoris deliberatif sangat relevan diterapkan untuk penanggulangan kemiskinan.
2. Masyarakat miskin utamanya janda miskin tidak hanya butuh bantuan berupa uang atau barang atau modal, tapi juga perhatian dan bimbingan, oleh karena itu pelibatan Kader PKK tingkat desa menjadi sangat penting dan berguna, karena selama ini telah terbukti menjadi relawan pemberdayaan keluarga, untuk itu perlu dioptimalkan perannya melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program sekaligus perkembangan usaha KRTP. Kader PKK diharapkan adalah orang yang paling faham dan paling dekat dengan kondisi KRTP, sehingga dengan didampingi Kader, program ini diharapkan akan lebih optimal.
3. Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan tidak hanya bertujuan mengembangkan potensi ekonomi rumah tangga sangat miskin, tetapi juga harkat dan martabat, motivasi, rasa percaya diri dan harga diri mereka, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat (nguwongke-wong) antara lain dengan tetap memberikan penghormatan pada KRTP untuk memberikan keputusan (restu) terhadap jenis usulan kebutuhan anggota rumah tangga. Membantu warga miskin dengan hati tidak dapat menggunakan ukuran efisiensi, sejauh-jauhnya yang bisa digunakan hanyalah ukuran efektivitas, agar bantuan bagi RTS KRTP ini tepat sasaran, dan tepat pemanfaatan.
4. Penggunaan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh TNP2K, yang digunakan untuk : (i) Memudahkan melakukan analisa atau perencanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang relevan dengan indikator sosial ekonomi Rumah Tangga Sasaran sekaligus memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut; (ii) Memudahkan penetapan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial, karena BDT

telah menyediakan daftar nama dan alamat individu/keluarga/rumah tangga dengan status kesejahteraan 30% terendah.

5. Penyusunan sistem informasi basis data rumah tangga miskin, melalui sistem ini dapat dipantau Rumah Tangga Sasaran yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah, sehingga dapat dipantau perkembangan sosial ekonominya sebagai dampak pemberian bantuan.
6. Selama ini Model pendekatan dan penanganan penanggulangan kemiskinan cenderung homogen, sama rata tanpa memperhatikan karakteristik RTS. Bantuan yang diberikan mengikuti selera pemberi bantuan bukan berdasarkan kebutuhan RTS. Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan ini selain sasarannya spesifik untuk KRTP, penanganannya menggunakan pendekatan partisipatoris deliberative, calon penerima diajak bicara apa yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha, sehingga meskipun status penerima sama-sama janda, ternyata usulan kebutuhan sangat beragam, hal tersebut menunjukkan kreativitas masing-masing KRTP untuk dapat bertahan hidup.
7. Mengajarkan KRTP sasaran untuk ikut memikirkan solusi peningkatan kesejahteraannya sekaligus bertanggungjawab atas bantuan yang diterima karena KRTP diberi kesempatan untuk membelanjakan sendiri bantuan tunai yang diberikan sesuai kebutuhannya.
8. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tugas pemerintah untuk menanganinya, stake holder terkait mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai provinsi dari perangkat daerah, Tim Penggerak PKK, akademisi sampai relawan pemberdayaan masyarakat harus terlibat aktif untuk bersama-sama memikirkan nasib janda miskin dan bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraannya.
9. Rekomendasi kedepan, minimal Jalin Matra dilaksanakan dengan APBD masing-masing Kabupaten/Kota di Jatim, syukur-syukur dijadikan model mekanisme kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik itu di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Nasional.